RAPAT PERMUSYAWARATAN, PEMERIKSAAN PERSIAPAN DI PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA

Jefri
Email: jefrifernando2019@gmail.com
No BP: 1910003600045
Universitas Ekasakti Padang

A. PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung yang menyelesaikan sengketa antara seorang atau badan hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Objek gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara dimulai dengan didaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tempat Tergugat berkedudukan. Dalam Proses Pemeriksaan dalam Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan dalam dua proses pemeriksaan yaitu sebelum pemeriksaan pokok perkara yang mencakup rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan serta pemeriksaan pokok perkara.

Rapat Permasyarakatan merupakan tahap pemeriksaan sebelum pemeriksaan pokok perkara yang bersifat rahasia. Dalam rapat permusyawaratan ini ketua pengadilan memeriksa gugatan yang masuk, apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan apakah memang termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. Ketentuan ini dibuat mengingat Peradilan Tata Usaha Negara merupakan instansi yang baru bagi kita, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami betul fungsi, tugas dan wewenang serta hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Kalau semua gugatan yang masuk diteruskan ke persidangan tanpa melalui rapat permusyawaratan (dismissel process), dkuatirkan akan

banyak waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang terbuang percuma untuk memeriksa perkara yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga akhirnya terpaksa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, artinya jika semua gugatan langsung masuk pada Pemeriksaan Persidangan, dikuatirkan hanya akan membuang-buang waktu saja, bukan hanya bagi Penggugat akan tetapi juga bagi Pengadilan dan Tergugat, padahal Tergugat disini adalah seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang umumnya memiliki tugas eksekutif yang cukup sibuk.

Dalam Proses Pemeriksaan dalam Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan dalam dua proses pemeriksaan yaitu sebelum pemeriksaan pokok perkara yang mencakup rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan serta pemeriksaan pokok perkara. Dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut hakim dapat melakukan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, tidak harus di ruang sidang, bahkan dapat pula dilakukan di ruang kerja hakim tanpa memakai toga.

Permasalahan yang dikaji dalam makalah ini adalah (1) Apa Saja Dasar Hukum dan Pengertian Rapat Permusyawaratan dalam Peradilan Tata Usaha Negara?, (2) Bagaimana Penerapan Rapat Permusyawaratan dalam Peradilan Tata Usaha Negara?, (3) Apa Saja Dasar Hukum dan Pengertian Pemeriksaan Persiapan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara?, (4) Bagaimana Penerapan Pemeriksaan Persiapan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara?.

Makalah ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui Apa Saja Dasar Hukum dan Pengertian Rapat Permusyawaratan dalam Peradilan Tata Usaha Negara, (2) Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Rapat Permusyawaratan dalam Peradilan Tata Usaha Negara, (3) Untuk mengetahui apa saja Dasar Hukum dan Pengertian Pemeriksaan Persiapan Dalam Peradilan Tata Usaha

Negara, (4) Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pemeriksaan Persiapan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum dan Pengertian Rapat Permusyawaratan dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Rapat permusyawaratan diatur dalam pasal 62 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan dengan suatu penetapan untuk tidak menerima dan menyatakan tidak berdasar suatu surat gugatan dalam hal :

- a. Pokok gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan untuk memeriksa
- b. Syarat Gugatan tidak dipenuhi sebagaimana dimuat dalam pasal 56 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986
- c. Tidak didasarkan dengan alasan yang layak
- d. Tuntutan ternyata telah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut
- e. Telah lewat masa waktu yaitu 90 hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diketahui.

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasala 62 ayat(1) Undangundang nomor 5 Tahun 1986 merupakan prosedur penyelesaian yang disederhanakan dimana Ketua Pengadilan diberikan kewenangan untuk memutuskan dengan suatu penetapan dan disertai pertimbangan hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar.

S.F Marbun menyatakan bahwa pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan ini merupakan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan sebelum

pemeriksaan pokok sengketa. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/PLW/1993-PEND/PTUN-JKT dalam pertimbangan hukum disebutkan Rapat Permusyawaratan diartikan sebagai “read kamer”, yaitu pemeriksaan kamar tertutup yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan.

2. Penerapan Rapat Permusyawaratan dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Sebelum dilakukan rapat permusyawaratan, surat gugatan yang masuk akan dilakukan penelitian administratif oleh panitera, wakil panitera atau panitera muda pengganti untuk mengetahui dipenuhinya syarat-syarat dari surat gugatan tersebut yaitu dilihat dari segi formalnya saja. Hal ini dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 dan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 24 Maret 1992 Nomor 051/Td.TUN/III/1992 yang memberikan petunjuk tentang pelaksanaan penelitian administratif. Panitera tidak berhak menolak perkara dengan alasan apapun yang berkaitan dengan materi gugatan, dan kemudian dibuatkan resume gugatan oleh panitera.

Setelah penelitian administratif maka surat gugatan beserta resume gugatan diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan. Rapat permusyawaratan dilakukan oleh Ketua Pengadilan tanpa dihadiri oleh para pihak. Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang Hakim sebagai rapporteur (raportir).

Hasil rapat permusyawaratan ini dituangkan dalam suatu Penetapan yang ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua apabila Ketua berhalangan hadir dan Panitera/Wakil panitera. Hasil penetapan ini diucapkan oleh Ketua Pengadilan yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Terhadap penetapan Ketua Pengadilan ini dapat diajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan tersebut diucapkan. Perlawanan tersebut diajukan dalam bentuk surat gugatan biasa yang memenuhi syarat-syarat gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 56

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Pemeriksaan gugatan perlawanan tersebut akan dilakukan dengan acara cepat dengan Hakim tunggal, apabila perlawanan tersebut diterima maka penetapan yang diucapkan oleh Ketua Pengadilan tersebut dinyatakan gugur dan pokok gugatan akan diperiksa dan diputus dengan acara biasa. Apabila perlawanan tersebut ditolak maka tidak dapat diupayakan upaya hukum banding maupun kasasi.

3. Dasar Hukum Dan Pengertian Pemeriksaan Persiapan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Pemeriksaan Persiapan diatur dalam pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud tersebut, hakim wajib :

- a. Memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima
- d. Terhadap putusannya tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Maksud disediakannya acara Pemeriksaan Persiapan adalah guna mengimbangi dan mengatasi kesulitan Penggugat memperoleh informasi atau data yang berada dalam kekuasaan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini diperlukan mengingat kedudukan antara Penggugat dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berada pada posisi yang tidak seimbang. Dengan

disediakan. Acara Pemeriksaan persiapan diharapkan posisi tersebut akan seimbang, yakni dengan cara memberikan kesempatan kepada Hakim untuk meminta penjelasan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, bahkan Pejabat Tata Usaha Negara lainnya yang dipandang perlu ataupun mendengar keterangan siapa saja yang dianggap perlu oleh Hakim, juga mengumpulkan surat-surat yang dianggap perlu oleh Hakim.

Segi positif adanya Acara Pemeriksaan Persiapan ini akan menimbulkan keyakinan awal bagi penggugat, bahwa setidaknya dari segi kewenangan absolut dan kewenangan relative serta syarat-syarat gugatan diyakini telah terpenuhi, sehingga gugatan tidak perlu diragukan dan dikhawatirkan kemungkinan dieksepsi oleh tergugat.

4. Penerapan Pemeriksaan Persiapan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Sebelum dilakukan pemeriksaan persiapan, surat gugatan yang masuk akan dilakukan penelitian administratif oleh panitera, wakil panitera atau panitera muda pengganti untuk mengetahui dipenuhinya syarat-syarat dari surat gugatan tersebut yaitu dilihat dari segi formalnya saja. Kepada Hakim diberi kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Wewenang hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai Penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, mengingat Penggugat dan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama.

Dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak perlu dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang lengkap, cukup oleh seorang Hakim Anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat yang dituangkan dalam bentuk penetapan.

C. PENUTUP

Dari uraian yang sudah disampaikan dalam pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rapat Permusyawaratan merupakan prosedur pendahuluan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan untuk menyatakan gugatan ditolak atau tidak berdasar dengan suatu penetapan yang ketentuannya dapat dilihat dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.
2. Penetapan Rapat Permusyawaratan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Penetapan tersebut dapat dilakukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari sejak penetapan tersebut diucapkan , yang kemudian akan diperiksa dengan acara cepat.
3. Pemeriksaan Persiapan merupakan prosedur pendahuluan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, agar wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas atau untuk mematangkan perkara sebelum pemeriksaan pokok sengketa di muka umum dimulai, yang ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Pemeriksaan Persiapan ini akan menimbulkan keyakinan awal bagi penggugat, bahwa setidaknya-tidaknya dari segi kewenangan absolut dan kewenangan relative serta syarat-syarat gugatan diyakini telah terpenuhi, sehingga gugatan tidak perlu diragukan dan dikhawatirkan kemungkinan dieksepsi oleh tergugat.
4. Pemeriksaan Persiapan ini dapat pula dilakukan oleh Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis. Dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak perlu dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang

lengkap, cukup oleh seorang Hakim Anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat yang dituangkan dalam bentuk penetapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, *Justicia Islamica*, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, *Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, *The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon)*, Volume 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.
- Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, *Jurnal Respublica* Volume 17, Nomor 2, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, *Jurnal Gagasan Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Laurensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.